

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan</i>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa	Presentase	70%	70%	72,3%	>100%
1.2	Indikator 1.2 Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu	Presentase	90%	25%	25%	100%
II	<i>Sasaran Program 2, Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang terselesaikan Tepat Waktu	Presentase	90%	90%	100%	25%
2.2	Indikator 2.2 Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan	Dokumen	12 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%
2.3	Indikator 2.3 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu	Presentase	90%	90%	100%	100%
III	<i>Sasaran Program 3 Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	Indeks	3 dari 4	3	3	100%

IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan yang Baik					
4.1	Indikator 4.1 Rencana Aksi Pembangunan RB General		2.55	**	**	**
4.2	Indikator 4.2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB		100	**	**	**
4.3	Indikator 4.3 Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai		5	**	**	**
4.4	Tingkat Maturitas SPIP		3.58	**	**	**
4.5	Nilai SAKIP		75	**	**	**
4.6	Indeks Perencanaan Pembangunan		97	**	**	**
4.7	Tingkat Digitalisasi Arsip		90	**	**	**
4.8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		95	**	**	**
4.9	Indeks Tata Kelola Pengadaan		85	**	**	**
4.10	Indeks Sistem Merit		345,5	**	**	**
4.11	Capaian IKU		100	**	**	**
4.12	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)		5 (WTP)	**	**	**
4.13	Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)		75	**	**	**
4.14	Survei Penilaian Integritas (SPI)		85	**	**	**
4.15	Indeks BerAKHLAK		2.55	**	**	**

Kinerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: *Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan*

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: *Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan* ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa
2. Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Latar Belakang

Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa

Dalam rangka mensosialisasikan program kerja dan untuk membangun citra positif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipandang perlu untuk mempersiapkan materi dalam mengolah dan menyebarkan konten baik berupa berita, infografis, videografis, foto atau video. Untuk mendapatkan bahan pertimbangan yang efektif maka diperlukan dasar sebagai bahan pertimbangan materinya.

Pada dasarnya, sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah bagaimana mengelola informasi terutama yang berurusan dengan pencapaian kebijakan yang efektif dan peningkatan citra positif lembaga. Pada tahap selanjutnya, informasi yang diperlukan bukan hanya bersifat ekonomi namun juga mengenai masalah politik, gejolak sosial, konflik horizontal, keamanan, pertanian, budaya, kemajuan teknologi dan informasi yang bersifat multi dimensi.

Kemajuan teknologi tidak hanya mengubah cara kerja sistem, tetapi juga memperluas sumber-sumber informasi maupun medianya. Sebagai contoh, pola penanganan krisis terkait media dan sumber informasi sekarang sudah berubah. Dalam hitungan menit bahkan detik, informasi sudah akan menyebar melalui social media, kemudian TV, dibagi (*share*), muncul analisis yang kadang makin menyesatkan dan dalam 24 jam sudah tercetak di media.

Pengukuran Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mensosialisasikan program kerja sekaligus untuk membangun citra positif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Kementerian yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

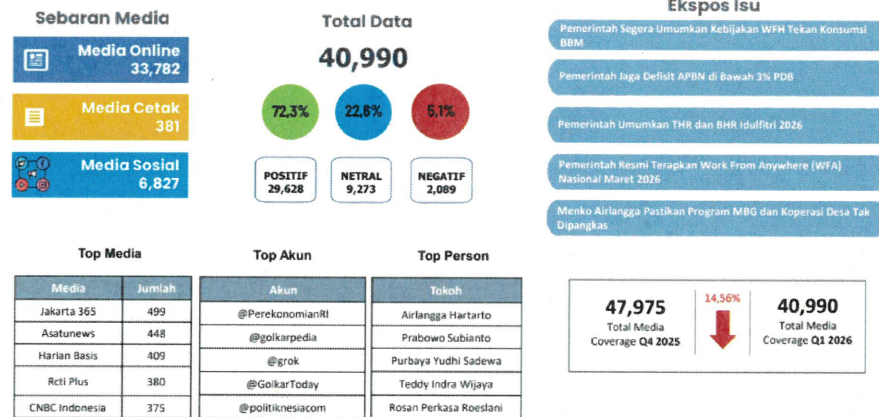
Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan I tahun 2026, IKU Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa (Media Online, Media Cetak, dan Media Sosial) yang telah terealisasi sebesar 72,3% atau mencapai 103,29% dari target tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa	Persentase	70	72,3	103,29% (Memuaskan)

Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa yang menjadi acuan dikeluarkan oleh pihak ketiga yaitu Konsultan Independen Media Monitoring oleh PT Kazee Digital Indonesia.

Executive Summary



Pada periode Januari-Maret 2026, statistik proporsi pemberitaan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada seluruh platform media massa berdasarkan sentimen pemberitaan menunjukkan *visibility* terbesar pada pemberitaan positif dengan jumlah berita sebanyak 29.628 berita atau 72,3%. Lalu diikuti oleh netral dengan 9.273 berita atau sebesar 22,6% dan negatif dengan 2.089 berita atau sebesar 5,1%.

Persentase positif mengenai pemberitaan terkait Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendominasi. Meski demikian, tetap diperlukan upaya peningkatan kinerja seperti dalam bentuk pendekatan kepada media dalam menyampaikan kebijakan atau kegiatan positif yang tengah dilakukan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan hubungan masyarakat antarlembaga terkait isu koordinasi di bidang perekonomian	Terlaksana	Melalui forum kehumasan dan forum sejenis yang diselenggarakan KL lain
2	Pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik	Terlaksana	Melalui mekanisme PPID
3	Penyelenggaraan edukasi publik mengenai kebijakan terkait isu di bidang perekonomian	Terlaksana	Melalui berbagai kanal yang dimiliki Kemenko Perekonomian maupun mekanisme lainnya

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung telah dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang terangkum dalam table dibawah ini

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian Output
1	Terlaksananya hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga terkait isu koordinasi di bidang perekonomian	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%
2	Terwujudnya pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%
3	Terselenggaranya edukasi dan diseminasi publik mengenai kebijakan terkait isu di bidang perekonomian	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW I	Realisasi Output Kegiatan Per TW I
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	Rp6.242.876.	Rp946.380.017 (15,16%)	1 paket dokumen

Untuk isu negatif yang masih muncul, walaupun memiliki persentase sangat kecil, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan pemantauan yang lebih terkait isu serupa agar tidak mengalami lonjakan pemberitaan yang signifikan, sehingga dapat mendukung pencapaian output pada triwulan I.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yakni kurangnya koordinasi antarunit kerja dalam menyusun rencana konten dan strategi komunikasi mengingat jenis isu yang ditangani oleh tiap-tiap unit kerja sangat beragam.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka terdapat upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yakni dengan melakukan koordinasi dan komunikasi serta melibatkan tiap-tiap unit kerja dalam menyusun berbagai isu-isu strategis yang akan menjadi bahan/masukan bagi pemberitaan Kemenko Perekonomian.

1.2 Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu

Latar Belakang

Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka mengoordinasikan, menyinkronkan, dan melakukan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Ruang lingkup rapat koordinasi yang menjadi tanggungjawab Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan meliputi:

- Rapat Koordinasi tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh para Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah serta pejabat negara atau pihak lain yang dianggap perlu;
- Rapat Koordinasi tingkat Eselon I yang dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh para pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau pihak lain yang dianggap perlu.

Risalah rapat koordinasi adalah rangkuman/catatan atas hasil atau hal yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat Koordinasi.

Hasil Rapat Koordinasi adalah tindakan yang diputuskan atau diambil oleh pimpinan Rapat Koordinasi berdasarkan musyawarah mufakat antar peserta dan pimpinan Rapat Koordinasi dalam Rapat Koordinasi.

Risalah Rapat Koordinasi terdiri dari:

- Risalah Rapat Koordinasi Menteri, disusun oleh Bagian Persidangan dan ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian;
- Risalah Rapat Koordinasi Sekretaris Kementerian yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian, disusun oleh Bagian Persidangan dan ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian;
- Risalah Rapat Koordinasi Eselon I yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian dengan pengusulan dari Deputi/Staf Ahli, disusun oleh Bagian Persidangan, difinalkan oleh unit kerja terkait di Deputi/Staf Ahli terkait, dan ditandatangani oleh Deputi/Staf Ahli terkait.

Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi tepat waktu mencakup pendistribusian dan pendokumentasian risalah rapat koordinasi dalam kurun waktu paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya nota dinas dari unit kerja terkait yang ditujukan kepada Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan perihal penyampaian risalah rapat koordinasi yang telah ditetapkan, untuk didistribusikan atau didokumentasikan

Persentase penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi tepat waktu dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ risalah rapat koordinasi yang diselesaikan} = \frac{\sum \text{risalah yang diselesaikan tepat waktu}}{\sum \text{risalah yang disusun}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas koordinasi kebijakan perekonomian nasional, Bagian Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memfasilitasi penyelenggaraan berbagai kegiatan rapat koordinasi, pertemuan, dan audiensi sepanjang Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan baik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian maupun oleh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenko Perekonomian, sebagai wujud nyata fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang menjadi mandat kelembagaan.

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 12 Paket Dokumen penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target triwulan sebesar 3 Paket Dokumen. Dokumen Terdiri dari Undangan dan Risalah Rapat Koordinasi Menteri, Rapat Kelompok Kerja dan Forum Koordinasi, serta Rapat Pimpinan Kemenko Bidang Perekonomian. Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi tepat waktu yang mencapai target yang telah terealisasi 3 Paket Dokumen atau mencapai 25% dari target Tahun 2026 sebesar 12 Paket Dokumen dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan I tahun 2026, Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu yang telah terealisasi sebesar 3 Paket dokumen atau mencapai 100% dari target triwulan I Tahun 2026 atau 25% dari Target Tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu	Persentase	3	3	100% (Memuaskan)

Selama periode Januari hingga Maret 2026, kegiatan rapat koordinasi, pertemuan, dan audiensi berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi. Pimpinan Tinggi Madya menyelenggarakan sebanyak 46 kegiatan, yang terdiri atas 21 kegiatan pada bulan Januari, 19 kegiatan pada bulan Februari, dan 6 kegiatan pada bulan Maret 2026. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan sebanyak 29 kegiatan, dengan rincian 6 kegiatan pada bulan Januari, 15 kegiatan pada bulan Februari, dan 8 kegiatan pada bulan Maret 2026. Secara kumulatif, total kegiatan yang terselenggara selama Triwulan I Tahun 2026 mencapai 75 kegiatan.

Penyusunan risalah kegiatan pimpinan dilaksanakan melalui mekanisme kolaborasi antarunit. Pada sebagian kegiatan, risalah disusun langsung oleh Tim Sekretariat teknis substansi di masing-masing unit kerja sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan, sedangkan Bagian Persidangan memfasilitasi distribusi risalah atau surat penyampaian hasil rapat koordinasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Sebagai kelengkapan administratif dari setiap kegiatan rapat, Bagian Persidangan mengelola proses penyusunan, reviu, dan distribusi risalah melalui tahapan permohonan pemeriksaan, permohonan penetapan, hingga finalisasi risalah. Capaian penyelesaian risalah selama Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

1. Risalah Rapat Pimpinan Tinggi Madya

Tahapan	Januari	Februari	Maret	Total
Permohonan Pemeriksaan	15	10	5	30
Permohonan Penetapan	14	10	5	29
Risalah Final	13	6	4	23

2. Risalah Rapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Tahapan	Januari	Februari	Maret	Total
Permohonan Pemeriksaan	4	9	3	16
Permohonan Penetapan	3	4	4	11
Risalah Final	2	2	3	7

Secara keseluruhan, selama Triwulan I Tahun 2026 terdapat 46 risalah yang telah diajukan permohonan pemeriksaan, 40 risalah yang telah diajukan permohonan penetapan, dan 30 risalah yang telah ditetapkan pejabat berwenang dan telah didistribusikan kepada seluruh pihak terkait.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pendistribusian risalah rapat koordinasi dalam kurun waktu paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya nota dinas dari unit kerja terkait yang ditujukan kepada Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan perihal penyampaian risalah rapat koordinasi yang telah ditetapkan	Terlaksana	Melalui Pencatatan Rekam Jejak Digital Persidangan
2	Pendokumentasian risalah rapat koordinasi dalam kurun waktu paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya nota dinas dari unit kerja terkait yang ditujukan kepada Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan perihal penyampaian risalah rapat koordinasi yang telah ditetapkan	Terlaksana	Melalui Pencatatan Rekam Jejak Digital Persidangan dan Penyimpanan melalui Cloud Data Bagian Persidangan

Faktor Keberhasilan

Capaian penyelenggaraan kegiatan dan penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu selama Triwulan I Tahun 2026 tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas. Koordinasi dan pemantauan yang dilakukan secara berkala antara Bagian Persidangan dengan sekretariat Pimpinan serta unit kerja terkait menjadi fondasi utama yang memungkinkan proses reviu dan persetujuan risalah berjalan lebih terarah dan terstruktur pada setiap tahapannya.

Selain itu, pengaturan penugasan notulis yang disesuaikan dengan prioritas agenda rapat dan ketersediaan sumber daya, disertai dengan koordinasi internal untuk pemerataan beban kerja, turut berkontribusi dalam menjaga kesinambungan proses penyusunan risalah di tengah tingginya intensitas kegiatan. Hal ini diperkuat pula oleh pelaksanaan pemantauan yang konsisten pada setiap tahapan reviu dan *clearance* risalah bersama unit kerja terkait, guna memastikan tidak terdapat hambatan yang berlarut-larut dalam proses persetujuan.

Tidak kalah penting, pemanfaatan alternatif media komunikasi dan pertukaran dokumen secara digital, yang didukung oleh koordinasi aktif dengan unit pengelola teknologi informasi, turut menjadi faktor penopang keberlanjutan proses kerja, khususnya pada situasi yang berpotensi terganggu oleh kendala layanan teknologi informasi

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung telah dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang terangkum dalam table dibawah ini

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian Output
1	Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi sesuai peraturan yang berlaku	12 paket Dokumen	3 paket	25%

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja pengelolaan persidangan, selama Triwulan I Tahun 2026 Bagian Persidangan telah melaksanakan penyusunan konsep risalah rapat koordinasi pimpinan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian maupun Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Konsep risalah disampaikan kepada unit kerja pengampu teknis sesuai substansi pembahasan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan rapat koordinasi sebagai bahan penyempurnaan dan penetapan hasil rapat.

Selanjutnya, risalah rapat koordinasi yang telah ditetapkan didistribusikan kepada para pihak terkait paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya nota dinas atau instruksi lisan dari pimpinan unit kerja terkait yang ditujukan kepada Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan. Pelaksanaan distribusi tersebut memastikan hasil rapat koordinasi dapat segera dimanfaatkan sebagai dasar tindak lanjut oleh unit kerja terkait.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola administrasi persidangan, seluruh dokumen rapat koordinasi yang meliputi undangan, daftar hadir, rekaman, dan risalah yang telah ditetapkan didokumentasikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penetapan risalah. Pelaksanaan rencana aksi tersebut mendukung terselenggaranya pengelolaan arsip rapat yang tertib, akuntabel, dan mudah ditelusuri serta berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja pengelolaan persidangan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW I	Realisasi Output Kegiatan Per TW I
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	Rp6.242.876.000	Rp946.380.017 (15,16%)	3 paket dokumen

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

penyelesaian risalah rapat koordinasi yang tepat waktu pada Triwulan I Tahun 2026 secara umum berjalan dengan baik dan mampu mendukung penyelenggaraan rapat koordinasi pimpinan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian dokumentasi persidangan, khususnya penyusunan, reviu, penetapan, distribusi, dan pengarsipan risalah rapat koordinasi.

Tantangan utama berasal dari proses reviu dan persetujuan risalah yang memerlukan waktu relatif lebih panjang karena tingginya intensitas agenda Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kondisi tersebut berdampak pada proses clearance risalah yang bersifat berjenjang dan melibatkan lintas unit kerja, sehingga penyelesaian setiap tahapan sangat bergantung pada selesainya tahapan sebelumnya. Selain itu, pengelolaan dokumentasi persidangan juga memerlukan penyesuaian terhadap klasifikasi dokumen rapat, mengingat sebagian undangan, daftar hadir, bahan rapat, rekaman, notulensi, maupun risalah memiliki tingkat kerahasiaan tertentu dan mekanisme distribusinya disesuaikan dengan arahan pimpinan rapat.

Dari sisi sumber daya, tingginya frekuensi rapat koordinasi belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan notulis, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas serta ketepatan waktu penyusunan risalah. Di samping itu, proses penyusunan dan distribusi risalah masih memiliki

ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan jaringan dan layanan teknologi informasi, sehingga gangguan pada sistem berpotensi menghambat kelancaran penyelesaian dokumentasi persidangan.

Untuk menjaga pencapaian target kinerja, Bagian Persidangan terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan sekretariat pimpinan serta unit kerja terkait melalui pemantauan berkala terhadap setiap tahapan penyusunan, reviu, persetujuan, hingga distribusi risalah. Pengaturan penugasan notulis juga dilakukan berdasarkan prioritas agenda rapat dan ketersediaan sumber daya guna mewujudkan pemerataan beban kerja. Sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas layanan, Bagian Persidangan menetapkan standar penyelesaian penyusunan konsep risalah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan rapat, pendistribusian risalah atau surat penyampaian hasil rapat koordinasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya nota dinas atau instruksi dari pimpinan unit kerja terkait, serta pendokumentasian seluruh kelengkapan rapat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak risalah ditetapkan.

Ke depan, upaya perbaikan akan terus diarahkan pada penguatan tata kelola dokumentasi persidangan melalui peningkatan efektivitas koordinasi selama tahap persiapan dan pelaksanaan persidangan, optimalisasi komunikasi dengan sekretariat pimpinan dan unit kerja terkait, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan penyusunan risalah, program *knowledge sharing* antar-kedeputan, dan kegiatan *benchmarking* dengan kementerian/lembaga yang telah menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan persidangan. Di samping itu, koordinasi dengan unit pengelola teknologi informasi akan terus diperkuat untuk memastikan keberlangsungan layanan digital yang mendukung penyusunan dan distribusi risalah secara lebih andal, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

2

Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: **Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif** ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang terselesaikan tepat waktu
2. Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan
3. Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang tepat waktu

2.1 Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang terselesaikan tepat waktu

Latar Belakang

Naskah/Bahan Menteri adalah tulisan atau bahan paparan yang berisi informasi dan kebijakan yang disusun dan dipersiapkan untuk Menteri dalam bentuk naskah/bahan paparan/keynote/pointer. Waktu penyusunan naskah menteri adalah *deadline* jangka waktu maksimal yang diperlukan untuk menyusun naskah menteri hingga selesai dalam bentuk naskah/bahan paparan/keynote/pointer.

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan mempunyai tugas penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen di bidang strategi, publikasi, dan pelaksanaan komunikasi layanan publik, serta penyiapan dan pelaksanaan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di dalamnya, kelompok substansi Analisis Kebijakan memiliki peran dalam memfasilitasi penyiapan naskah bagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam rangka mengukur kinerja dan evaluasi secara memadai, kelompok substansi Analisis Kebijakan menyusun laporan kinerja yang pertama kali terkait jumlah dokumen naskah menteri yang selesai difasilitasi.

Metode pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama ini adalah penghitungan ketepatan waktu penyiapan naskah/bahan Menteri berdasarkan SOP, yaitu sebagai berikut:

- Apabila info Ratas/Disposisi/Undangan diperoleh dalam H-3 pelaksanaan, maka konsep bahan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan.
- Apabila info Ratas/Disposisi/Undangan diperoleh dalam H-2 pelaksanaan, maka draf bahan paling lambat 12 jam sebelum pelaksanaan

- Apabila info Ratas/Disposisi/Undangan diperoleh dalam H-1 pelaksanaan, maka draf bahan paling lambat 4 jam sebelum pelaksanaan

Adapun rumus perhitungan indikator tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Naskah Menteri yang selesai Tepat Waktu}}{\text{Total Naskah Menteri}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 12 Paket Dokumen, sebagaimana tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026. Target ini dibagi secara triwulanan, dengan rincian **target pada Triwulan I sebesar 3 Paket Dokumen**. Setiap Paket Dokumen terdiri dari kumpulan naskah/bahan Menteri yang telah difasilitasi penyusunannya oleh Kelompok Substansi Analis Kebijakan antara lain mencakup naskah pidato, bahan paparan, *keynote speech*, pointer konferensi pers, pernyataan Menteri, dan dokumen lainnya sesuai arahan Pimpinan.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Kelompok Substansi Analis Kebijakan telah berhasil mencapai target kinerja sebesar **3 Paket Dokumen**, sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja pada triwulan ini adalah **100%**. Adapun dari 3 Paket dokumen tersebut, total sebanyak **168 dokumen** telah difasilitasi penyusunannya. Secara umum, seluruh dokumen telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang Terselesaikan Tepat Waktu	Persentase	90%	100%	111% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase penyelesaian naskah Menteri yang terselesaikan tepat waktu			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Memfasilitasi penyusunan naskah Menteri sesuai permintaan kegiatan	Tercapai	Telah difasilitasi 168 dokumen dalam 3 Paket Dokumen; seluruhnya selesai paling lambat 1 jam sebelum pelaksanaan.
2	Menyampaikan naskah kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sesuai tenggat pelaksanaan kegiatan	Tercapai	Seluruh naskah telah disampaikan tepat waktu, minimal 1 jam sebelum kegiatan berlangsung, tanpa keterlambatan .

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung pelaksanaan telah dihasilkan capaian output sebagai berikut:

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian Output
1	Penyelesaian Naskah Menteri yang terselesaikan Tepat Waktu	12 paket Dokumen	3 paket	25%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW I	Realisasi Output Kegiatan Per TW I
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	Rp6.242.876.000	Rp946.380.017 (15,16%)	3 paket dokumen

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah permintaan dokumen yang datang secara mendadak dan sering kali mengalami perubahan substansi maupun jadwal pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menyebabkan waktu yang tersedia untuk penyusunan naskah menjadi sangat terbatas. Selain itu, koordinasi dengan unit kerja teknis terkadang menghadapi hambatan karena perbedaan waktu penyampaian informasi yang berdampak pada efektivitas proses penyusunan.

Sebagai bentuk respons terhadap kendala tersebut, dilakukan sejumlah upaya perbaikan antara lain dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi awal bersama untuk memperoleh informasi kegiatan sedini mungkin. Tim juga menerapkan sistem pemantauan progres secara berkala agar proses penyusunan naskah lebih terstruktur. Selain itu, pembagian tugas yang lebih sistematis diantara anggota tim telah memastikan naskah yang disusun tetap berkualitas, meskipun dalam tenggat waktu yang tidak banyak.

2.2 Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan

Latar Belakang

Sinergi dan koordinasi yang optimal dalam proses penyiapan bahan pimpinan (naskah Menteri), penyelenggaraan persidangan, pengelolaan kehumasan dan informasi publik, serta manajemen strategi komunikasi dan publikasi. Hal ini mencakup peningkatan kualitas substansi, ketepatan waktu, serta keselarasan informasi yang disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan. Dengan terwujudnya koordinasi yang efektif antarunit terkait, diharapkan pelayanan informasi dan dukungan komunikasi pimpinan menjadi lebih responsif, terstruktur, dan mendukung pencapaian visi dan misi Kemenko Bidang Perekonomian.

Strategi komunikasi merupakan instrument strategis dalam menyusun perencanaan program komunikasi publik yang akan dijalankan oleh Kemenko Perekonomian. Dengan penyusunan strategi komunikasi yang efektif dan komprehensif, maka diharapkan kinerja komunikasi publik yang diemban oleh biro KLIP dapat menghasilkan kinerja yang baik dan mendukung kinerja Kemenko secara umum. Adapun dokumen strategis komunikasi tersebut terdiri dari:

1. Tiga dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun dokumen strategi komunikasi bulan Januari, Februari, dan Maret 2026
2. Tiga dokumen tentang strategi komunikasi Kemenko Perekonomian bulan Januari, Februari, dan Maret 2026

Yang masing-masing ketiga dokumen tersebut disatukan dalam dokumen monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial Triwulan I tahun 2026.

Hasil Pengukuran Kinerja

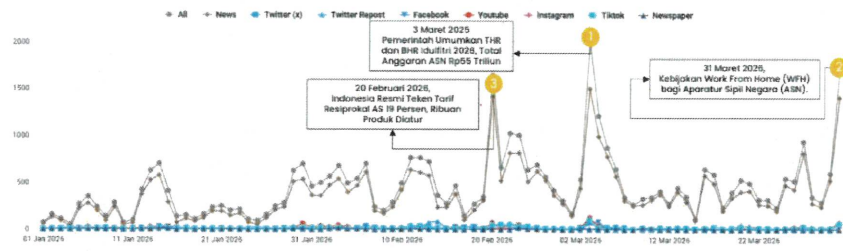
Hingga triwulan I tahun 2026, IKU tentang jumlah Dokumen Strategi Komunikasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah tercapai dengan tersusunnya tiga dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun tiga dokumen strategi komunikasi bulan Januari, Februari, dan Maret 2026.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun 2026	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-2.2 Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang Dihasilkan	Paket dokumen	12 dokumen	3 dokumen	25%

Dokumen Strategi Komunikasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun dari tiga dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial.



Pergerakan Data



- Pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) idulfitri 1447 H/2026 M. Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari setiap pekan, yakni setiap Jumat, mulai 1 April 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan ini merupakan langkah adaptif menghadapi dinamika global sekaligus mendorong transformasi pola kerja yang lebih efisien dan modern.
- Indonesia resmi menandatangani perjanjian perdagangan dengan tarif resiprokal 19 persen dengan Amerika Serikat (AS). Ada 1.819 pos tarif yang diatur dalam kesepakatan dagang kedua negara.

Pada periode Januari-Maret 2026, tersusun tiga dokumen Strategi Komunikasi Kebijakan. Ketiga dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil monitoring pemberitaan di media massa dan percakapan di media sosial, yang mencerminkan respons publik terhadap isu-isu strategis di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Pencapaian target ini menunjukkan konsistensi dan ketepatan dalam merumuskan arah komunikasi kebijakan yang berbasis data serta adaptif terhadap dinamika ruang publik. Ke depan, strategi komunikasi ini diharapkan dapat semakin memperkuat citra positif dan meningkatkan efektivitas diseminasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Jumlah Dokumen Straregi Komunikasi yang Dihasilkan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Terdapat 3 dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun dokumen strategi komunikasi.	Terlaksana	Melalui monitoring dan analisis media massa serta media sosial secara berkala
2	Tersusunnya 3 dokumen strategi komunikasi Kemenko Perekonomian.	Terlaksana	Melalui analisis dan evaluasi hasil monitoring dan analisis media massa serta media sosial secara berkala.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung telah dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang terangkum dalam table dibawah ini:

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian Output
1	Terdapat 3 dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun dokumen strategi komunikasi.	12 paket dokumen	3 paket dokumen	25%
2	Tersusunnya 3 dokumen strategi komunikasi Kemenko Perekonomian.	12 paket dokumen	3 paket dokumen	25%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW I	Realisasi Output Kegiatan Per TW I
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	Rp6.242.876.000	Rp946.380.017 (15,16%)	1 paket dokumen

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, dalam proses penyusunan dokumen strategi komunikasi, salah satu kendala yang dihadapi adalah dinamika isu yang berkembang dengan cepat seringkali menuntut respons komunikasi yang adaptif dan tepat waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi internal, pemanfaatan tools monitoring digital yang lebih komprehensif, serta penyusunan sistem kerja yang lebih terstruktur untuk memastikan ketepatan waktu dan kualitas dalam penyusunan dokumen. Ke depan, peningkatan kapasitas SDM dan integrasi data juga akan menjadi fokus dalam mendukung efektivitas strategi komunikasi kebijakan.

2.3 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu

Latar Belakang

Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang transparan mencerminkan profesionalisme dan integritas Kemenko Perekonomian sebagai Badan Publik. Penyelesaian permohonan informasi publik secara tepat waktu menjadi tanggung jawab Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, selaku PPID Utama, meskipun dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan pihak kedeputian sebagai PPID Pelaksana. Permohonan informasi yang diterima dari pemohon informasi lebih banyak terkait dengan kebijakan dan program yang dikuasai oleh Kemenko Perekonomian. Petugas Layanan Informasi yang juga tergabung dalam tim Sekretariat PPID Utama bertugas memeriksa kelengkapan dokumen permohonan informasi dan memprosesnya ke tahapan selanjutnya sehingga pada akhirnya akan diperoleh tanggapan atau jawaban untuk pemohon informasi.

Kriteria permohonan informasi yang diselesaikan tepat waktu yakni dengan memenuhi jangka waktu 10 hari kerja ditambah perpanjangan 7 hari kerja.

Hasil Pengukuran Kinerja

Pada periode triwulan I tahun 2026 (Januari-Maret 2026), IKU Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu yang telah terealisasi sesuai dengan jumlah permohonan informasi publik yang diterima sebanyak 8 permohonan dan telah diselesaikan semuanya secara tepat waktu dalam jangka 10 hari kerja, dan kalau masih belum terselesaikan masih bisa diperpanjang selama 7 hari kerja berikutnya. Jadi, telah tercapai 100% dari target di tiga bulan pertama 2026, yang mana hal ini mendukung pencapaian target tahunan di 2026. Sementara itu, untuk layanan keberatan selama triwulan I-2026 tidak ada satupun pemohon yang mengajukan keberatan. Ringkasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 IKU Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu	Persentase	90%	100%	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.3 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pemenuhan permohonan informasi publik dengan tepat waktu.	Terlaksana	Melalui mekanisme layanan permohonan informasi publik, baik pemohon datang langsung ke kantor maupun melalui website atau email PPID.
2.	Penyediaan layanan pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik.	Terlaksana	Melalui mekanisme layanan pengajuan keberatan atas informasi publik, baik pemohon datang langsung ke kantor maupun melalui website atau email PPID.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung telah dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang terangkum dalam tabel di bawah ini.

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian Output
1	Terpenuhinya permohonan informasi publik dengan tepat waktu.	90%	100%	100%
2	Tersedianya layanan pengajuan keberatan atas informasi publik.	90%	100%	100%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW I	Realisasi Output Kegiatan Per TW I
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	Rp6.242.876.000	Rp946.380.017 (15,16%)	1 paket dokumen

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yakni antara lain terbatasnya jumlah SDM PPID atau yang mengelola pelayanan informasi publik, sehingga masih ada kesulitan dalam berkoordinasi ketika meminta bahan atau substansi untuk memenuhi permohonan informasi publik. Selain itu, karena ada perubahan dalam struktur organisasi di Kemenko Perekonomian sejak tahun 2025 yang menyebabkan ada beberapa tupoksi yang sudah tidak berada dalam kewenangan Kemenko Perekonomian, seperti bidang pangan, keuangan dan lingkungan hidup, sehingga ada data atau informasi yang sudah tidak dikuasai lagi oleh Kemenko Perekonomian.

Lebih lanjut, masih terdapat persoalan pengelolaan arsip atas data atau informasi terkait kebijakan atau program yang masih kurang baik, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam merespons atau menjawab permohonan informasi. Lalu, masih kurangnya pemahaman unit-unit kerja terhadap aturan tentang keterbukaan informasi publik maupun tentang tugas PPID Pelaksana, sehingga masih sedikit kesadaran untuk melaksanakan tugas pelayanan permohonan informasi karena tidak ditunjuk satu petugas khusus dari masing-masing unit kerja.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka terdapat upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yakni dengan melakukan pelatihan rutin bagi petugas PPID atau paling tidak dilakukan sosialisasi kembali mengenai tugas dan fungsi PPID, diperkuat kembali digitalisasi dokumen dan perapihan arsip, serta dilakukan penetapan beberapa petugas khusus pelayanan informasi di tingkat ke deputian.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: **Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan.

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

Latar Belakang

Indeks kepuasan layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan mengukur indikator tingkat kepuasan layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan dengan melakukan survey layanan kepada unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Daftar pertanyaan ini memuat tentang 5 aspek-aspek penilaian yang memuat tentang jenis-jenis layanan di lingkungan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, serta output dari peningkatan yang dihasilkan. Aspek – aspek penilaiannya meliputi :

1. Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*)
2. Keandalan dalam layanan (*Reability*)
3. Sarana dan Prasarana Fisik (*Tangible*)
4. Kepastian dalam layanan (*Assurance*)
5. Sikap dalam layanan (*Empathy*)

Pada akhir survey terdapat tambahan form penulisan saran dan perbaikan. Jumlah Responden dipilih secara acak/random, dan berasal dari unit kerja di luar unit Sekretariat. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan 4 kategori, yaitu :

1. Sangat Puas (4), rentang nilai 3,51 – 4.00
2. Puas (3), rentang nilai 3.01 – 3.50
3. Tidak Puas (2), rentang nilai 2,51 – 3.00
4. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Adapun formulasi perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kepuasan} = \frac{\text{Rerata Jawaban dari Masing-Masing Item Survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4, di mana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Perjanjian Kinerja/PK Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan. Adapun target triwulan sebesar 3 berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya. Hingga Triwulan I Tahun 2026, indeks kepuasan layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 3 atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	Indeks	3 dari 4	3	100% (Memuaskan)

Proyeksi triwulan I tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi triwulan I tahun 2026. Realisasi triwulan I didorong oleh tingginya penyelesaian layanan yang membuat tingkat kepuasan layanan dapat tercapai. Mengingat kualitas pemenuhan layanan yang baik maka diprediksikan persentase penyelesaian Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan akan terus stabil sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Evaluasi hasil survey dan penyusunan rencana aksi peningkatan layanan	Terlaksana	Melalui Rapat Sinergi Komunikasi Publik di Bidang Perekonomian dengan Lintas Kedeputan dan Kementerian Lembaga yang di koordinasikan oleh Kemenko Perekonomian
2	Penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM	Terlaksana	
3	Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan pada TW I	Terlaksana	
4	Rekapitulasi terkait permohonan layanan dari unit kerja kedeputan pada TW I	Terlaksana	
5	Tindaklanjut keluhan layanan dari unit kerja pada TW I	Terlaksana	

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penyelenggaraan rapat dan pendampingan ke unit kerja melalui mekanisme daring/online.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 10 April 2026

Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan
Informasi, dan Persidangan



Haryo Limanseto
NIP. 19730128 199301 1 001